

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan. Maka untuk tercapainya keberhasilan pembangunan, segala aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah yang nantinya akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Dalam sebuah pembangunan, perencanaan merupakan syarat bagi terlaksananya pembangunan yang baik. Akan tetapi, perencanaan yang matang belum tentu membuat pembangunan itu berhasil apabila pada pelaksanaan kegiatannya masih sering timbul hal-hal yang dapat menghambat proses pembangunan. Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pembangunan sebagai sebuah perubahan yang membawa ke arah yang lebih baik butuh perencanaan agar tujuan yang diinginkan tepat sasaran. Perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam tujuan bernegara adalah ingin memajukan kesejahteraan umum yang direalisasikan melalui proses pembangunan. Dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 2 menjelaskan perencanaan dalam pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga sedangkan dalam perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dengan melihat

kebijakan tersebut perencanaan pembangunan nasional didalamnya mengenai esensi dari perencanaan pembangunan yang menentukan arah kebijakan dengan melihat kebutuhan masyarakat melalui alur kegiatan yang sistematis serta melihat sumber daya yang ada.

Menurut Tjakrowinoto, perencanaan pembangunan terdiri dari dua aspek didalamnya mengenai kegiatan penentuan dan proses dalam peningkatan keberhasilan pembangunan.¹ penjelasan tersebut bahwa didalam perencanaan pembangunan tidak bisa lepas dari isu strategi serta permasalahan yang diajukan dalam perencanaan pembangunan yang dimana akan disusun oleh pemerintah daerah dengan melihat aspirasi masyarakatnya. Daerah harus lebih fokus dalam melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan karakter daerahnya serta potensi daerahnya. Hal ini dapat diketahui di dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan dan pembanguann setiap daerah dengan memperhatikan permasalahan, isu staregis dan program selanjutnya dimasukkan didalam perioritas sasaran dan program dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), program strategis nasional dan perioritas sasaran dan program dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan fokus daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan adanya kegiatan perioritas yang di dukung dengan adanya dokumen perencanaan.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan faktor penting didalamnya harus lebih memperhatikan ketersediaan data pembangunan, isu startegis daerah yang didalamnya mengenai kondisi, masalah serta potensi daerah, kemampuan finansial dan dukungan kerangka regulasi sehingga dapat dilaksanakan

¹ Tjokrominito, Pembangunan Dilema dan Tantanganya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) Hlm 92

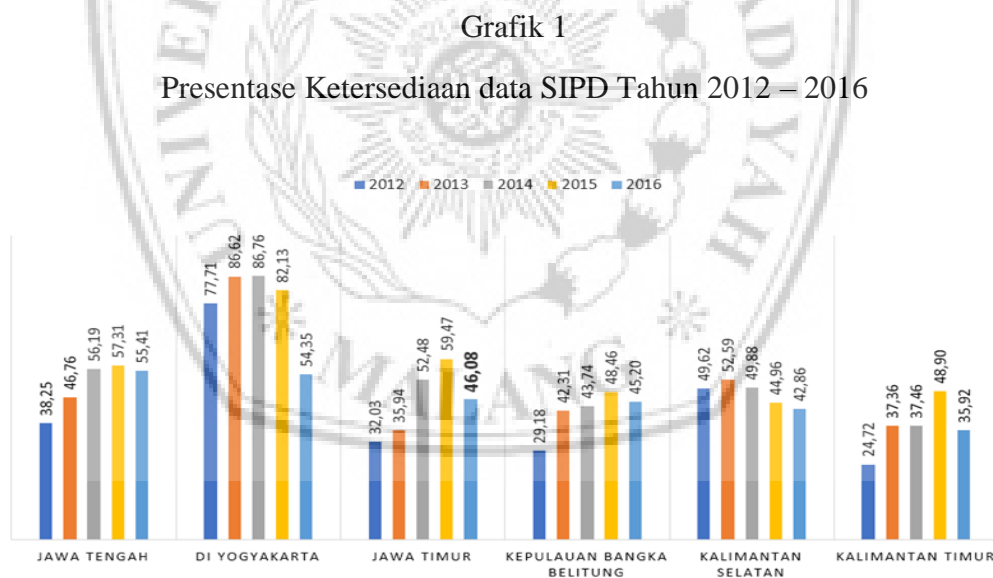
sebagai perencanaan pembangunan berkelanjutan.² Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan faktor terpentingnya untuk memperhatikan data dan informasi mengenai permasalahan pembangunan. data pembangunan sebagai peran utama dalam analisis permasalahan pembanguann yang selanjutnya dijadikan penyusunan kebijakan perencanaan pembanguan daerah serta menetapkan indikator-indikator pembangunan serta mengevaluasi hasil capaian pembangunan agar dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan data dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan berdasar pada data dan informasi pembangunan ini sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 yang dimana perencanaan pembangunan berdasar pada data dan informasi pembangunan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Data dan informasi dalam perencanaan pembangunan dapat diperoleh dari permasalahan pembangunan setiap daerahnya. Namun yang terjadi di daerah data-data mengenai pembangunan daerah kurang meperhatikan di dalam permasalahan yang dibutuhkan masyarakatnyakarena adanya pemangku kepentingan, serta data kurang diperbaruhi sesuai dengan data yang telah disesnsu oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan berdasarkan data dan informasi mengalami kendala, kendala inilah yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) dalam proses pengumpulan data pembangunan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

² Ely Sufianti, 2014, "Kepemimpinan dan perencanaan kolaboratif", jurnal perencanaan wilayah dan kota. Vol.25,no.1m hlm 77 -95, April 2014

Kendala ini disebabkan karena kurangnya koordinasi yang intensif antara OPD dengan Bappeda, minimnya pendanaan dan keterbatasan sumber daya manusia untuk mengidentifikasi data pembangunan, dan kurangnya kemampuan politik dari kepala daerah. Kendala ini lah yang telah di alami oleh bappeda provinsi serta kabupaten/kota, permasalahan yang terjadi di dalam pemerintah pusat kurang memiliki instrumen yang lebih banyak untuk menentukan ukuran pembangunan yang dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan capaian-capaian substansif program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.³

Permasalahan yang terjadi ini juga dapat dilihat dalam presentase penggunaan data dan dokumen yang ada didalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.



Sumber : Data evaluasi SIPD BAPEDA Jawa Timur Tahun 2016

³ Paparan evaluasi Pengelolaan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan daerah oleh Ir.Muhammad Hudori, M.Si Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bangda-Kemendagri, jakarta 13 Oktober 2017

Dalam penjelasan tabel 1 diatas pengelolaan dalam perencanaan pembangunan di Jawa Timur dari tahun 2012 sampai ke tahun 2015 mengalami peningkatan, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2015, namun yang terjadi pada tahun 2016 mengalami penurunan yang dimana penurunan ini disebabkan kendala yang telah dijelaskan diatas. Kendala yang telah terjadi berdampak pada perencanaan pembangunan yang kurang berdasar pada data dan informasi pembangunan sehingga kurang adanya tanggung jawab dan kurang tepat sasaran dalam perencanaan pembangunannya. Dengan melihat kendala yang terjadi Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku pemerintah pusat membuat suatu Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang disebut SIPD. SIPD ini bertujuan untuk integrasi perencanaan pembangunan secara nasional dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dengan memperhatikan data dan informasi dalam dokumen pembangunan.

Beramanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimana di dalam pasal 274 perencanaan pembangunan daerah dengan berdasar pada data dan informasi yang dikelola di dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), sedangkan di dalam pasal 391 dijelaskan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan keuangan daerah harus diolah didalam sistem informasi. Dengan adanya amanat tersebut maka Sistem Informasi Pembangunan Daerah dibentuknya sebagai penyedia informasi dalam pengelolaan perencanaan pembangunan dan keuangan di dalam pemerintah daerah.

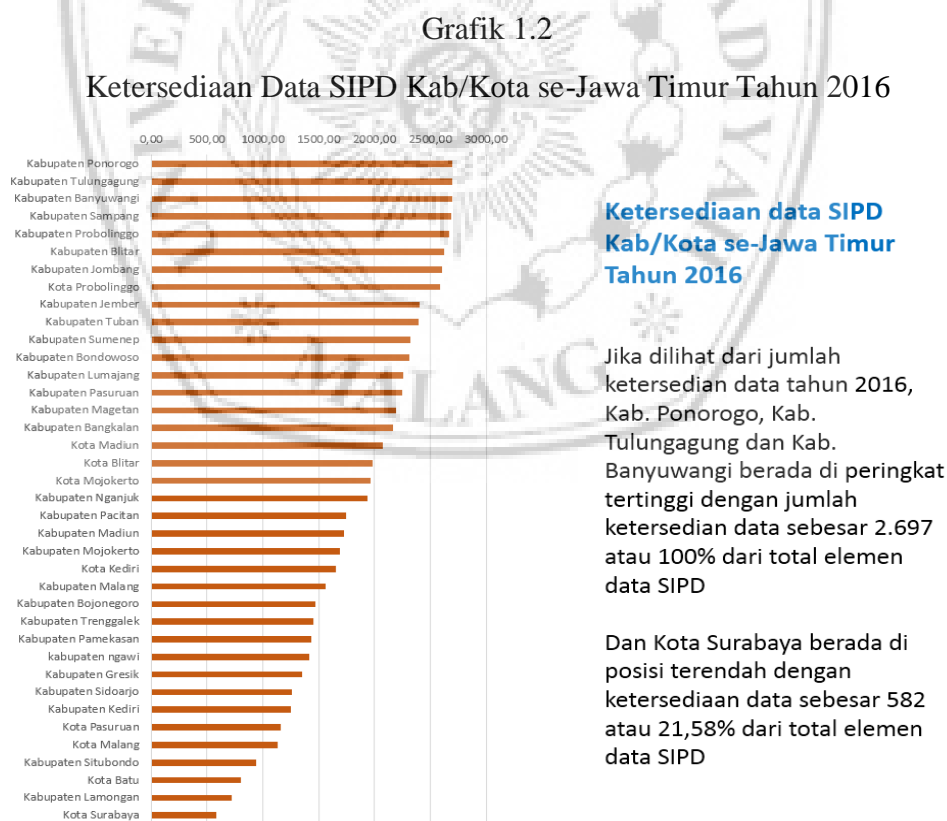
SIPD ini dijelaskan lebih lanjut didalam Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 mengenai Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Dengan melihat regulasi yang ada di dalam SIPD ini yang diharapkan dalam sistem ini dapat mengumpulkan data

secara terinci, *realtime* dan *online* di dalam mengumpulkan informasi dan data mengenai perencanaan pembangunan daerah. Melalui sistem informasi ini diharapkan dapat mengumpulkan data secara terpadu antara pusat dan daerah dengan mengedepankan teknologi informasi yang dimana sebagai acuan dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan dan pengevaluasian pembangunan daerah secara meluas, yang efektif serta efisien. Sistem informasi ini dapat di manfaatkan sebagai pendukung dalam integrasi pemanfaatan data terkait perkembangan pembangunan di dalam masing-masing instansi pemerintah. Sistem informasi harus berdasarkan data dan informasi juga tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 144, perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu instrumen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan pembangunan daerah adalah melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD ini merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai penyedia dokumentasi dan administrasi, serta sebagai pengolah data pembangunan daerah yang akan dijadikan sebagai informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi di dalam kinerja Pemerintah Daerah. Di dalam penjelasan SIPD ini SIPD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara nasional dengan melihat data dan informasi di masing-masing daerahnya.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah ini fokus kepada data perencanaan pembangunan daerah yang dimana data tersebut berbasis urusan dengan

mengedepankan hasil dari partisipasi masyarakat, yang dimana partisipasi masyarakat merupakan data asli sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan. Sistem Informasi Pembangunan Daerah ini sebagai instrument dalam evaluasi pembangunan daerah, yang dimana pengembangan sistem informasi pembangunan daerah ini menjadi 4 bagian yaitu (e-Database, e-Planning, e-Budgeting, dan e-Money) didalam elemen tersebut isinya terkait mengenai data yang dianalisis menjadi draf dokumen rencana pembangunan, pengendalian kebijakan dan dokumen rencana pembangunan. Pada tahun 2016 Bappeda Jawa Timur pada rapat evaluasi pengelolaan SIPD tahun 2016 yang dihadiri 38 kab/kota dengan bahasan mengenai pemetaan data berbasis urusan dengan melihat presentase ketersediaan data SIPD Kab/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2016 sebagai berikut:



Sumber: Unit pelayanan data Bappeda Provinsi Jawa Timur, Tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.2 pada pelaksanaan pengumpulan data, kendala yang telah dihadapi Kab/Kota tahun 2016 bahwa terbatasnya sumber daya manusia sebagai pengimput data SIPD dan pengumpulan data perencanaan pembangunan di BAPPEDA Kabupaten/Kota, terbatasnya anggaran terutama terkait pengelolaan data pembangunan di daerah, kurangnya kesadaran kepala daerah tentang pentingnya sistem informasi pembangunan daerah, karena belum terlihatnya dampak pemanfaatan dalam sistem informasi pembangunan daerah ini. Elemen data di SIPD tahun 2016 yang tidak digunakan dalam dokumen perencanaan, sehingga hanya fokus di keterisian bukan pemanfaatan dan sulitnya koordinasi dengan OPD terutama masalah data, karena data pembangunan hanya dimiliki oleh perangkat daerah itu sendiri dan minimnya upaya identifikasi permasalahan pembangunan daerah.⁴

Melihat penelitian mengenai lembaga kerjasama antar daerah di Indonesia ada satu penelitian tentang kerjasama antar daerah yang dimana penelitian ini dilakukan oleh Warsono tahun 2009 yang mencoba untuk mendeskripsikan pola kerjasama regional yang tetap di dalam lingkup daerahnya atau wilayah yang terjadi di Jawa Tengah. Hasil penelitian kerjasama regional ini menunjukkan bahwa ada dua pola hubungan antar pemerintah daerah, yakni *intergovernmental relation* dan *intergovernmental management*. Keduanya memperhatikan kerjasama antar daerah dengan relasi *networking*.⁵ *Intergovernmental relations* merupakan sebuah pola organisasi antar daerah yang hanya memungkinkan koordinasi dalam aspek

⁴ Paparan evaluasi rapat evaluasi dan bimbingan teknis pengelolaan SIPD Kabupaten/Kota Se- Jawa Timur Tahun 2017, Oleh Drs. Teguh Prayitno, M.M Kepala UPT PDP3, Bappeda Provinsi Jawa Timur

⁵ Warsono Hardi, 2009, regionalisasi dan manajemen kerjasama antar daerah, studi kasus dinamika kerjasama antar daerah yang berdekatan di Jawa Tengah, ringkasan disertasi program dokter ilmu administrasi negara Universitas Gajahmada Yogyakarta; Yogyakarta

umum di seluruh wilayah kerjasama, sedangkan *Intergovernmental Management* merupakan sebuah pola organisasi antar daerah yang memberikan kemungkinan penyelenggaraan manajemen yang terkendali penuh dengan sektor kerjasama yang jelas.

Dengan melihat permasalahan dalam penelitian yang telah dilaksanakan tersebut terlihat bahwa pentingnya pola hubungan antar pemerintah berbasis *Network* atau jaringan yang dimana sebagai jalan pintas untuk keluar dari keterbatasan mengelola hubungan yang berbasis terstruktur dan legal-formal. Dengan demikian pemilihan konsep *Intergovernmental Network* atau kerjasama pemerintah dalam basis jaringan ini merupakan sebagai proses untuk saling memahami dengan yang lain untuk berbagi informasi dengan daerah lain, serta dapat digunakan sebagai analisis masalah secara bersama dan dapat merencanakan aksi dalam mengatasi masalah secara bersama-sama.⁶ Dengan pemilihan teori serta melihat permasalahan yang terjadi diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan dapat menjawab serta menyelesaikan permasalahan, serta mengoptimalakan penggunaan SIPD akan membantu BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dalam menjalin hubungan sinergitas antar BAPPEDA Kabupaten/Kota yang dimana dibantu oleh Badan Koordinasi Wilayah III Malang. Peran Bakorwil ini sebagai lingkup pembatas dalam penelitian ini, wilayah kerja yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Wilayah III Malang diantaranya Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar.

⁶ Muhammad farid ma'ruf, Urgensi kerjasama antar daerah (intergovermental) dalam penangan bencana alam di daerah, Jurnal of publicsector innovation, Vol 1, No.1 November 2016.hlm 47-54

Dengan demikian peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan melihat mengenai hubungan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat dan daerah berbasis SIPD dengan memperhatikan kebijakan perencanaan pembangunan berbasis sistem informasi. Sehingga peneliti membuat fokus penelitian dengan membuat judul penelitian “*Intergovernmental Networks* dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Intergovernmental Networks* dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur ?
2. Apa saja yang menjadi permasalahan dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui *Intergovernmental Network* dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Untuk mengetahui permasalahan dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan tentang kerjasama pemerintah dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat dan daerah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) penelitian ini berkaitan dengan mata kuliah hubungan Pemerintah Pusat dan daerah serta sistem perencanaan pembangunan daerah, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat yang diharapkan secara praktis dari penelitian ini yaitu bagi akademisi Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi mata kuliah mengenai hubungan Pemerintah Pusat dan daerah serta perencanaan pembangunan yang dimana melalui sistem informasi pembangunan daerah ini terhadap kerjasama antar Pemerintah Pusat dan daerah dalam penyusunan dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk perkembangan SIPD dengan mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan melihat teori yang ada di dalam penelitian ini. Sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat

berjalan lebih efektif dan efisien. Dan bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi kepada masyarakat tentang perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat dan daerah melalui SIPD yang dimana dapat diakses melalui website yang ada di Bappeda Provinsi Jawa Timur. Sehingga dapat menciptakan perencanaan yang transparansi kepada masyarakat.

E. Definisi Konsep dan Operasional

1. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan definisi yang akan digunakan dalam suatu penjelasan umum serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berisi uraian tentang beberapa istilah konsep terkait penelitian yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, dalam rangka menjelaskan uraian lebih lanjut dalam penelitian diperlukan penjelasan mengenai beberapa pengertian atau istilah yang berkaitan dengan pokok pembahasan agar mendapatkan kejelasan di dalam variabel atau konsep yang hendak diukur dan digali datanya.⁷

Dengan melihat pada judul penelitian ini mengenai “*Intergovernmental Network* dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur”, maka definisi konsep akan dijelaskan sebagai berikut:

⁷ Hamidi. 2010, Penelitian dan Teori Komunikasi, UMM Press, Malang, hal.141

a. *Intergovernmental Network*

Intergovernmental network salah satu kerjasama antar daerah namun dalam pelaksanaannya berbasis jaringan. Pola hubungan kerjasama yang terjadi di dalam lapis pemerintah dengan mengedepankan *networking* atau jaringan yang digunakan sebagai salah satu alternatif untuk keluar dari batasan-batasan dalam pengelolaan hubungan yang berbasis struktural dan legal-formal.

Beberapa runutan kajian yang membahas proses regionalisasi dan kerjasama antar daerah, tercatat antara lain Goggin, Weichhart. Sementara beberapa pakar public management study belakangan memberikan kajian yang memperkuat konsep-konsep *intergovernmental management*. Goggin (1992) menjelaskan pada *The Communications Model of Intergovernmental Policy Implementation* sejumlah faktor yang mendukung (*inducement factors*) dan menghambat (*constraint factors*) dalam kerjasama regional pada berbagai level pemerintahan, sementara Weichhart (2002) lebih tegas mengemukakan sejumlah faktor yang berperan dalam proses regionalisasi dan kerjasama antar daerah antara lain: tekanan global, keterbatasan kemampuan dan potensi serta ego lokal.

Dalam pola hubungan kerjasama berbasis jaringan ini didalamnya memiliki salah satu alternatif dalam pengelolaan hubungannya dalam lapis pemerintahan karena pola berbasis jaringan ini terjadi karena adanya kesepahaman bersama bahwa adanya keterkaitan dan memiliki ketergantungan antar lapis pemerintahan.⁸

⁸ Pamudji, S., 1985, Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan Dari Administrasi Negara, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan. Hlm 13

b. Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan merupakan perjalanan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada bersama masyarakat sesuai dengan wilayah kerja di lingkup daerahnya. Kerja pemerintah daerah berjalan bersama dengan partisipasi masyarakat dengan semangat gotong royong untuk mewujudkan pembangunan di daerahnya. Perencanaan pembangunan daerah ini diarahkan untuk memanfaatkan potensi yang ada di daerah untuk mengembangkan sumber daya manusia, kualitas hidup, *skill*, dan bantuan pemerintah.⁹

Perencanaan pembangunan berdasarkan jangka periodenya di bagi menjadi perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek. Jangka panjang dalam kurun waktu 10 -25 tahun dan jangka menengah kurun waktu 5 tahunan dan jangka pendek perencanaan setiap tahunan. Di dalam perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktunya dari 3 tersebut jangka waktu yang paling akurat merupakan jangka pendek karena di dalamnya terus menggali data dan informasi perencanaan dari hasil musrenbang.

c. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadminstrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi di dalam kinerja Pemerintah Daerah. Di dalam penjelasan SIPD ini SIPD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara nasional dengan melihat data dan informasi dimasing-masing daerahnya.

⁹ Bintaro Tjakrominoto, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1984 Hlm 34

SIPD ini berjalan sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah yang dimana tercantum di dalam Pasal 274 bahwa perencanaan pembangunan daerah dengan berlandaskan data serta informasi yang di kelola di dalam sistem informasi pembangunan daerah. SIPD ini juga berdasar pada Permendagri No.8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah dengan Definisi 4 bagian sistem informasi pembangunan daerah sebagai berikut, *E-database* merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan serta mengadminstrasikan data dan informasi kondisi daerah, *E-planning* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk merumuskan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah *E-Budgeting* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk merumuskan kebijakan anggran pembangunan daerah, sedangkan *E-Monev* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengukur capaian kerja penyelenggaraan pembangunan daerah.

2. Definisi Operasional

Adapun variabel-variabel *Intergovernmental Network* yang akan didefinisikan secara operasional di dalam penelitian ini, variabel dari penelitian ini nantinya akan menganalisis data dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. *Intergovernmental Network* dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
 - a) Kewenangan Pelaksanaan dan Pengelolaan SIPD
 - b) Mekanisme Kinerja dalam Pengelolaan SIPD
 - c) Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan SIPD
 - d) Evaluasi Penguatan Data dan Kelembagaan Daerah

2. Permasalahan dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

- a) Kurangnya kesadaran perangkat daerah
- b) Koordinasi pengumpulan dan pemanfaatan data untuk SIPD

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dimana dengan menjelaskan data sesuai dengan hasil penelitian yang jabarkan melalui tulisan sesuai dengan temuan peneliti. Menurut Bogan dan Tylor dalam buku Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan hasil dari sumber kata-kata tertulis yang menciptakan data deskriptif dan dapat diamati oleh peneliti sebagai permasalahan yang akan diteliti.¹⁰

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu kejadian yang mana di dalam penelitian ini objeknya adalah perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat dan daerah berbasis sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) di BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dengan melihat berbagai kendala yang terjadi di dalam evaluasi pengelolaan SIPD tahun 2016. Hal ini dilaksanakan dengan cara mengklasifikasikan, menganalisis dan menyimpulkan data baru disimpulkan dari khusus ke umum.

¹⁰ Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (hlm. 4)

2. Sumber Data

Sumber data menurut Arikunto adalah : *Person* (orang) Yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis. Penelitian ini akan menempatkan kepala UPT Pelayanan data perencanaan dan pendanaan pembangunan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, Kepala Bidang Pelayanan data perencanaan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dan Sub Direktorat Data Pembangunan Bakorwil III Malang.

Place (tempat) Yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Diam dimaksudkan untuk ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, warna dan lain-lain. Sedangkan bergerak diartikan untuk segala aktivitas, kinerja dan lain-lain. Hal ini berkaitan dengan tempat penelitian yaitu Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jawa Timur UPT Pelayanan data perencanaan dan pendanaan pembangunan dan Bakorwil III Malang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi terstruktur dengan merancang pelaksanaan observasi secara sistematis yang terkait dengan perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan daerah berbasis sistem informasi pembangunan daerah.

b) Wawancara

Wawancara terstruktur dengan menggunakan *interview guide* untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Sehingga nantinya di dalam *interview guide* akan mengajukan berbagai pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan dan permasalahan pada *intergovernmental*

network dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

c) Dokumentasi

Dokumentasi yang dapat diambil melalui data dapat berupa data internal yang didapat dari UPT Pelayanan data perencanaan dan pendanaan pembangunan, BPS, Jurnal, dan penelitian sebelumnya tentang perencanaan pembangunan daerah berbasis sistem informasi.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian primer dalam penelitian ini adalah Kepala UPT PDP3 (Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan) BAPPEDA Jawa Timur dan Kepala Bidang Pelayanan data perencanaan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. sedangkan penelitian sekunder yang dilaksanakan di Badan Koordinasi Wilayah III Malang diantaranya Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar.¹¹

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh penulis sebagai tempat untuk mendapatkan data dari suatu penelitian yang sedang diteliti sehingga data yang didapatkan lebih akurat. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur dan Bakorwil III Malang.

¹¹ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

6. Analisis Data

Ada berbagai cara untuk menganalisis sebuah data, menurut Habermas dalam Herdiansyah, terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data yakni sebagai berikut:¹²

a) Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) di bidang pelayanan data dan perencanaan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dan Bakorwil III Malang.

b) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini setelah pengumpulan data, data-data yang terkait dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat dan daerah yang mencerminkan kerjasama di dalam SIPD direduksi untuk digolongkan kedalam tiap permasalahan sehingga data dapat ditarik kesimpulan.

c) *Display Data*

Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Mendisplay data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan

¹²Moeleong, L.J., (2011) *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm 282

lebih mudah dipahami mengenai kerjasama antar Pemerintah Pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan berbasis SIPD.

d) Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang ada di bidang pelayanan data dan perencanaan mengenai perencanaan pembangunan yang mencerminkan SIPD. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹³

G. Kerangka Berfikir

Dalam pelaksanaan *Intergovernmental Network* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Dilihat dari jaringan dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan pada lapis pemerintahan. Perwujudan dalam pelaksanaan *intergovernmental network* dalam lapisan pemerintahan dilihat dari perencanaan pembangunan berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang dimana aktor utama dalam pelaksanaan SIPD merupakan Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Pembangunan Daerah dengan berdasarkan Permendagri No. 8 Tahun 2014 tentang SIPD. Dari perwujudan ini selanjutnya dilihat dengan berdasarkan komponen dari perwujudan *intergovernmental network* yang dimana pertama adanya *administrator* yang dimana pihak yang menjadi inisiator dan implementator dalam proses pembangunan hingga pelaksanaan kerjasama yang dimana memiliki peran yang lebih penting dalam

¹³ Sugiyono. 2013. *Op.Cit.* hlm 252

pelaksanaan aktivasi kerjasama jaringan dan juga dijadikan sebagai penentu keberhasilan kerjasama.

Pertama, *administrator* dalam pelaksanaan *intergovernmental network* dalam Perencanaan Pembangunan berbasisi Sistem Informasi Pembangunan Daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Koordinasi III Wilayah Malang di dalam prosesnya membangun dan mengembangkan interaksi, pertukaran informasi, dan identifikasi masalah.

Kedua, *participating organization* merupakan partisipasi organisasi pendukung sebagai fasilitator dan pendukung kerjasama dalam sumber pendanaan. Sehingga, dalam kerjasama pengelolaan hal ini berarti adanya dukungan pendanaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Badan Koordinasi Wilayah III Malang sebagai implementator kerjasama.

Ketiga, *interorganizational process* atau proses terjadinya perumusan program dan strategi hingga jaringan kerjasama antar daerah. Adapun dalam komponen ini telah terjadi komunikasi lintas sektoral antara Kabupaten/ Kota yang ada di dalam Badan Koordinasi Wilayah III Malang untuk melakukan sinergitas jaringan kerjasama yang akan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan perencanaan pembangunan dengan berbasis sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).

Keempat, *interorganizational outcomes* atau hasil kerjasama yang telah dilakukan oleh masing-masing daerah yang diukur melalui presentase ketersediaan data dan keterisian SIPD yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dan sejauh mana pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan dengan mengedepankan data dan informasi pembangunan daerah.

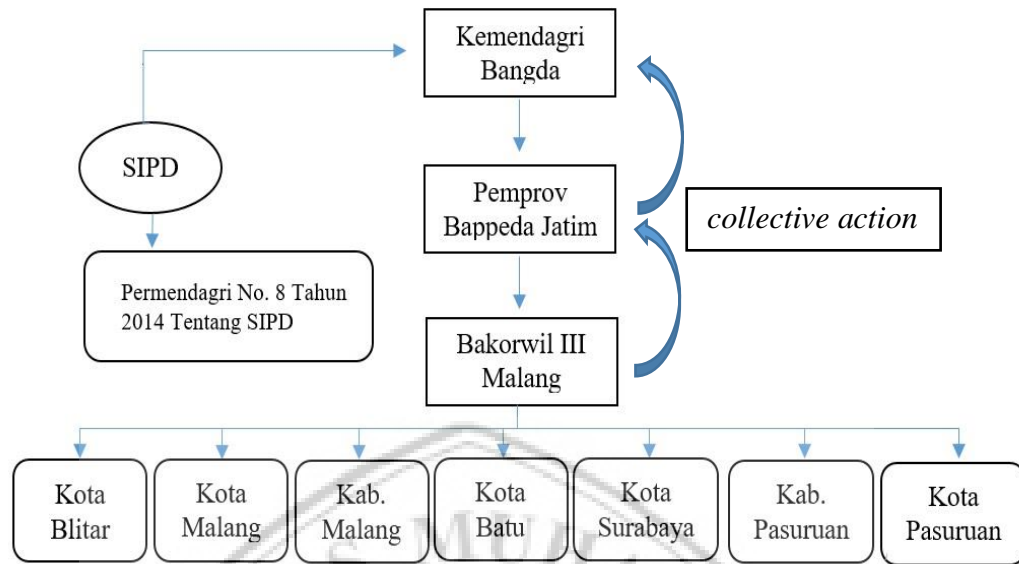
Dalam hal ini, Badan Koordinasi Wilayah III Malang sebagai pelaksana dan penanggung jawab dalam menjalankan sistem informasi pembangunan daerah. Kemudian, pelaksanaan kerjasama oleh Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar. Adapun hasil dari kerjasama dalam sistem informasi pembangunan daerah yaitu tingkat keterisisan dan ketersediaan data SIPD .

Maka sesuai dengan *intergovernmental networks* maka jaringan dalam lapisan pemerintahan pada pelaksanaan SIPD ini merupakan perwujudan dari *Action Networks*. Karena dalam pelaksanaan program dan strategi oleh masing-masing daerah yang dilakukan sesuai dengan proporsi dan kemampuan masing-masing daerah serta dilakukannya evaluasi kepada setiap daerah mengenai ketersediaan data dalam pengelolaan SIPD.

Adapun kunci keberhasilan kerjasama antar daerah yang ditekankan pada suatu tindakan bersama (*collective action*) melalui beberapa komponen tersebut dapat dilihat dari adanya sinergitas antar daerah dalam pelaksanaanya, meningkatnya komitmen dan interaksi antar daerah yang keseluruhan berpengaruh terhadap pelaksanaan SIPD.

Berikut merupakan bagan kerangka berfikir yang di dalamnya terdapat hubungan antara proses dan hasil yang dicapai dalam jaringan antara Pemerintahan sesuai dengan komponen *intergovernmental networks* dan tetap mengacu pada kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan kedua daerah.

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2018